



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan Nomor 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telepon/Faksimile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id.
Website : www.sumpiuhkec.banyumaskab.go.id.

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

CAMAT SUMPIUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran;

b. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a , Instansi Kecamatan Sumpiuh perlu adanya Rencana Aksi;

c. bahwa menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sumpiuh tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sumpiuh Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Rencana Aksi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- Kedua : Rencana Aksi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dan untuk menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh Kecamatan Sumpiuh Tahun 2026;
- Ketiga : Rencana Aksi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembe ttulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumpiuh
pada Tanggal 2 Januari 2026

A.n. BUPATI BANYUMAS



Lampiran : Surat Keputusan Camat Sumpiuh
 Nomor 05 Tahun 2026
 Tentang Rencana Aksi Kecamatan
 Sumpiuh Kabupaten Banyumas
 Tahun 2026

RENCANA AKSI
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

No.	Tujuan				Sasaran				Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target 2026	Target Penyelesaian		Jumlah Anggaran	Penanggung jawab
	Uraian	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Tujuan	Satuan	Target								
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83	Pengendalian Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83				Camat
						Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3	Pengendalian SPIP Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah		3				
						Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4	Pengendalian Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		4				
						Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	Pengendalian capaian kinerja koordinasi kecamatan	Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan		100				
					Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah				Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	TW 1	25		
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
											%	100	TW 1	25		

									Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TW 2	50		
												TW 3	75		
												TW 4	100		
												TW 1	31		
												TW 2	31		
												TW 3	31		
												TW 4	31		
												TW 1	1		
												TW 2	1		
												TW 3	1		
												TW 4	1		
												TW 1			
												TW 2			
												TW 3			
												TW 4			
												TW 1	25		
												TW 2	50		
												TW 3	75		
												TW 4	100		
												TW 1	25		
												TW 2	50		
												TW 3	75		
												TW 4	100		
												TW 1	1		
												TW 2	1		
												TW 3	1		

													TW 4	6		
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	TW 1	1	200,000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	TW 1	25		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
										Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Nilai	50,64	TW 1	0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	0		
													TW 3	50,64		
													TW 4	0		
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	TW 1	2	5,765,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	2		
													TW 3	2		
													TW 4	2		
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	TW 1	1	14,187,289	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	3		
													TW 3	3		
													TW 4	3		
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	TW 1	1	3,377,500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	3		
													TW 3	3		
													TW 4	3		
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	TW 1	1	57,916,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	1		

													TW 3	1		
													TW 4	1		
													TW 1	1		
													TW 2	3		
													TW 3	3		
													TW 4	3		
													TW 1	3		
													TW 2	3		
													TW 3	3		
													TW 4	3		
													TW 1	0		
													TW 2	0		
													TW 3	1		
													TW 4	0		
													TW 1	25		
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
													TW 1	25		
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
													TW 1	0		
													TW 2	0		
													TW 3	0		
													TW 4	0		

[illegible]

					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah			TW 3	75		
													TW 4	100		
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	TW 1	2	23,200,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	3		
													TW 3	2		
													TW 4	3		
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	TW 1	0	4,810,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	2		
													TW 3	2		
													TW 4	2		
					Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Unit	3	TW 1	3	24,525,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	0		
													TW 3	0		
													TW 4	0		
					Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Unit	2	TW 1	0	5,400,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	0		
													TW 3	2		
													TW 4	0		
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	TW 1	0	7,500,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													TW 2	0		
													TW 3	1		
													TW 4	2		
					Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan	%	100	TW 1	25		Kasi Ketentrman dan
													TW 2	50		

					peraturan daerah dan peraturan kepala daerah				dan Peraturan Kepala Daerah	penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			TW 3	75		Ketertiban Umum
													TW 4	100		
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	TW 1	3	6,500,000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	3		
													TW 3	3		
													TW 4	3		
					Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	8	TW 1	2		Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	2		
													TW 3	2		
													TW 4	2		
					Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	TW 1	1	2,300,000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	TW 1	1	3,700,000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	TW 1	25		Kasi pelayanan
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
											Dokumen	6	TW 1	0		

					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			TW 2	2	100,000	Kasi pelayanan
													TW 3	2		
													TW 4	2		
					Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	TW 1	25		Kasi pelayanan
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	TW 1	1	100,000	Kasi pelayanan
													TW 2	0		
													TW 3	0		
													TW 4	1		
					Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	TW 1	1	3,444,000	Kasi pelayanan
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	TW 1	25		Kasi Pemdes dan kelurahan, dan Kasi pelayanan
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	TW 1	3	4,800,000	Kasi pemdes dan Kelurahan
													TW 2	3		
													TW 3	3		

													TW 4	3		
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	TW 1	3	2,000,000	Kasi pelayanan
													TW 2	3		
													TW 3	3		
													TW 4	3		
					Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	TW 1	25		Kasi pelayanan
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
					Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	TW 1	1	2,750,000	Kasi pelayanan
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	TW 1	1	9,100,000	Kasi Pemdes dan Kelurahan
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	TW 1	0		Kasi Pemdes dan Kelurahan
													TW 2	0		
													TW 3	0		
													TW 4	0		
					Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan				Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	11	TW 1	11	5,900,000	Kasi Pemdes dan Kelurahan
													TW 2	0		

					Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			TW 3	0		
													TW 4	0		
					Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	TW 1	0	2,750,000	Kasi Pemdes dan Kelurahan
													TW 2	1		
													TW 3	0		
													TW 4	0		
									Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	11	TW 1	0	600,000	Kasi Pemdes dan Kelurahan
													TW 2	11		
													TW 3	0		
													TW 4	0		
					Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	4	TW 1	1		Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	4	TW 1	1	13,600,000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
										Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	TW 1	1		Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	1		
													TW 3	1		
													TW 4	1		
					Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	TW 1	0	65,590,000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													TW 2	25		
													TW 3	25		
													TW 4	0		

					Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	TW 1	25		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
					Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	TW 1	0	2,400,000	Kasi Ekonomi Pembangunan
													TW 2	2		
													TW 3	2		
													TW 4	2		
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	18	TW 1	0	4,050,000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
													TW 2	6		
													TW 3	6		
													TW 4	6		
					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	TW 1	6	2,100,000	Kasi Ekonomi Pembangunan
													TW 2	0		
													TW 3	0		
													TW 4	0		
					Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	TW 1	25		Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Ekonomi Pembangunan
													TW 2	50		
													TW 3	75		
													TW 4	100		
					Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	28	TW 1	0	10,075,000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
													TW 2	14		
													TW 3	14		

					Masyarakat di Wilayah Kecamatan								TW 4	0		
										Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	TW 1	0		
													TW 2	2		
													TW 3	2		
													TW 4	0		
					Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	6	TW 1	6	7,730,000	Kasi Ekonomi Pembanguna n
													TW 2	0		
													TW 3	0		
													TW 4	0		
					Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	14	TW 1	0	9,617,500	Kasi Pemberdayaa n Masyarakat
													TW 2	7		
													TW 3	7		
													TW 4	0		
										Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	TW 1	0		
													TW 2	2		
													TW 3	2		
													TW 4	0		
					Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	TW 1	0		Kasi Pemberdayaa n Masyarakat dan Kasi Ekonomi Pembanguna n
													TW 2	0		
													TW 3	50		
													TW 4	50		
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	2	TW 1	0	1,950,000	Kasi Ekonomi Pembanguna n
													TW 2	0		
													TW 3	0		

													TW 4	2		
									Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	TW 1	0		Kasi Ekonomi Pembangunan	
								TW 2				0				
								TW 3				0				
								TW 4				2				
					Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyar akatan	14	TW 1	0	36,849,000	Kasi Pemberdayaa n Masyarakat	
								TW 2				0				
								TW 3				14				
								TW 4				0				
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga Kemasyar akatan	7	TW 1	0	1,100,000	Kasi Pemberdayaa n Masyarakat	
							TW 2	0								
							TW 3	0								
							TW 4	7								

A.n. BUPATI BANYUMAS

PUJAR SENO